

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1931, Kantor Sekretaris Komisi imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi “pintu terbuka”, yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih control atas kebijakan imigrasi Direktorat jenderal imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas Mengingat saat ini pelayanan public yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah adalah salah satu bagian dari fungsi pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hokum dan hak asasi manusia Kemenkumham berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenkumham dipimpin oleh seorang menteri yang sejak 27 Oktober 2017 dijabat oleh Yasonna H. Laoly. Kementerian Hukum dan HAM pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus

1945 dengan nama Departemen Kehakiman, yang kemudian terus berganti nama sesuai dengan fungsinya, Departemen Hukum dan Perundang – undangan (1999), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001), Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009).

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau paspor merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Kebutuhan masyarakat akan paspor saat ini sangat meningkat seiring dengan arus globalisasi yang tinggi. Teknologi informasi yang semakin canggih lantas menjadi salah satu aspek untuk menunjang pelayanan yang baik guna memudahkan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis sebagai unit pelaksana teknis dibawah Devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas dibidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis berlokasi di JL. Ahmad Yani No 4 Bengkalis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis termasuk salah satu Kantor Imigrasi yang sudah cukup tua keberdaanya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dibentuk pada tahun 1952 dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi 11 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bengkalis
2. Kecamatan Rupert
3. Kecamatan Bantan
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Siak Kecil
6. Kecamatan Rupert Utara
7. Kecamatan Mandau

8. Kecamatan Pinggir
9. Kecamatan Batin Solapan
10. Kecamatan Talan Mandau
11. Kecamatan Bandar Laksmana

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah pembangunan daerah dan pemekaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis terpecah dengan berdirinya Kantor Imigrasi Dumai, Kantor Imigrasi Selat Panjang dan Kantor Imigrasi Siak Sri Indrapura.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis berada di Jl. Ahmad Yani No 4 Bengkalis Kota, Kec Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis memiliki anggota karyawan sebanyak 30 orang. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis melaksanakan seleksi tim pokja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seleksi dilaksanakan untuk memilih koordinator masing-masing area perubahan dan dinilai langsung oleh penanggung jawab Pembangunan Zona Integritas Dimas Pramudito. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis telah mendapatkan penghormatan dari pusat dan masuk dalam kandidat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM). Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis bahwa dalam menuju Zona Integritas WBK dan WBBM tersebut, akan melakukan pembenahan secara internal dan eksternal. Di posisi internal, seluruh petugas Imigrasi Bengkalis akan melakukan pengawasan yang telah dibangun sebelumnya agar dalam melaksanakan tugasnya dan melayani Masyarakat dengan sikap prima dan tulus Ikhlas. Sedangkan untuk eksternal, Masyarakat perlu mengetahui bahwa pihak Imigrasi bengkalis dalam melayani seluruh pemohon, tidak ada dilakukan pilih kasih dan pandang bulu. Artinya semua pemohon sama sepanjang persyaratannya lengkap, dan tidak menjadi TKI non procedural.

Promosi jabatan menjadi salah satu motivasi bagi seseorang dalam berkontribusi di sebuah organisasi atau perusahaan. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk berusaha menjadi lebih baik dan lebih maju dibandingkan posisi saat ini. Kesempatan untuk peningkatan dalam organisasi sering kali disebut

sebagai promosi. Promosi mengacu pada peralihan dari satu posisi ke posisi lain yang memiliki status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Seseorang cenderung bekerja dengan antusias jika ada kemungkinan untuk mendapatkan promosi dari pekerjaannya, dan promosi bagi karyawan adalah faktor penting yang meningkatkan semangat kerja. Promosi jabatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi, serta bertujuan untuk memperbarui sumber daya manusia dalam organisasi guna memastikan kelangsungan hidup organisasi.

Kinerja karyawan merujuk pada hasil yang dicapai baik dari segi kualitas maupun kuantitas oleh individu dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan serta tugas yang telah ditetapkan dan merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dengan standar yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, yang didasarkan pada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, emosional, dan kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang, serta keterampilan fisik yang diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam organisasi.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis kepada beberapa karyawan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Promosi jabatan ini terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu jabatan lain Contohnya, Kepala Urusan Kepegawaian menjadi Kepala Urusan Keuangan. Apabila terjadi promosi jabatan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis maka kinerja karyawan akan mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Promosi jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas berikut tujuan penelitian yang akan dilakukan.

1. Untuk menganalisis bagaimana tanggapan Responden tentang Promosi Jabatan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu
2. Untuk menganalisis bagaimana tanggapan Responden tentang Kinerja Karyawan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu
3. Untuk menganalisis bagaimana Pengaruh Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdiri dari : manfaat untuk penulis, perusahaan/ instansi, dan pihak lain

1. Manfaat Penelitian Bagi Penulis
Manfaat bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan menekankan pentingnya mengevaluasi kinerja karyawan dan promosi jabatan, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
2. Manfaat bagi perusahaan/instansi
Manfaat bagi perusahaan/instansi sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa depan, perusahaan sebaiknya mengutamakan evaluasi kinerja karyawan.
3. Manfaat bagi pihak lain
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi yang berharga bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang bergerak di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan penilaian kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Batasan masalah, dan Sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan variable inti.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Populasi dan sampel penelitian, Teknik penarikan sampel, Teknik pengumpulan data, Teknik Pengolahan data, Pengukuran skala, Pengujian validitas dan reliabilitas, Metode analisa data, Hipotesis Penelitian, Model penelitian, Jenis penelitian, Definisi konsep dan operasional, dan jadwal dan anggaran biaya.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Sejarah singkat tentang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis serta Strukturnya.

BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan secara rinci tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini.

BAB 6 : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilaksanakan.